



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 10012-10025

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pengaruh Intergovernmental Revenue, Pendapatan Pajak Daerah dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Kalimantan Tengah)

Argy Dimaz Dzaky Bryllian¹, Iwan Christian², Theresia Mentari³, Muhammad Ichsan Diarsyad⁴,
Sifera Patricia Maithy⁵

¹⁻⁵Universitas Palangka Raya

argydimazdzakybryll@gmail.com¹, iwan.christian@feb.upr.ac.id², theresiamentari@feb.upr.ac.id³,
muhammad.ichsan@feb.upr.ac.id⁴, siferapatriciamaitthy@feb.upr.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intergovernmental revenue, pendapatan pajak daerah, dan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama periode 2020–2024. Sampel penelitian terdiri atas 14 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga diperoleh 70 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intergovernmental revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar $-0,094442$ dan probabilitas $0,0215$. Sementara itu, pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar $0,009493$ dan probabilitas $0,4826$. Opini audit BPK juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar $-0,055613$ dan probabilitas $0,2206$. Secara simultan, ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas F -statistic sebesar $0,119718$. Nilai Adjusted R-squared sebesar $0,129171$ menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah masih relatif rendah. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi faktor yang melemahkan kinerja keuangan daerah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kata Kunci: Intergovernmental Revenue, Pendapatan Pajak Daerah, Opini Audit BPK, Kinerja Keuangan Daerah, Kalimantan Tengah

1. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan kinerja keuangan daerah sebagai indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan intergovernmental revenue berupa dana transfer dari pemerintah pusat, di mana komposisi keduanya menentukan tingkat kemandirian fiskal daerah. Penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah khususnya keseimbangan antara PAD dan dana transfer berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah (Hanum, 2022).

Salah satu permasalahan struktural yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia adalah tingginya ketergantungan terhadap intergovernmental revenue atau dana transfer dari pemerintah pusat, yang secara langsung berdampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Ketergantungan ini mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal daerah, karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pajak daerah belum

mampu menopang pembiayaan pembangunan secara mandiri. Penelitian terdahulu secara tegas membuktikan bahwa dana transfer berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota, yang mengindikasikan terjadinya fenomena flypaper effect di mana besarnya transfer justru melemahkan insentif daerah untuk mengoptimalkan PAD-nya (Siswanto et al., 2023). Di sisi lain, (Nathasya, 2024) dalam penelitiannya pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun secara statistik tidak signifikan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh (Sugi & Mertha, 2024) yang meneliti pemerintah kabupaten di wilayah Flores, Provinsi NTT, di mana dana transfer ke daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Inkonsistensi hasil-hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh intergovernmental revenue dan PAD terhadap kinerja keuangan daerah bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik fiskal spesifik masing-masing daerah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut pada wilayah dengan kondisi fiskal yang berbeda.

Kondisi tersebut tergambar secara nyata di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan (*Data APBD Indonesia Dari DJPK*, 2025) Provinsi Kalimantan Tengah, struktur pendapatan daerah secara agregat masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 87,72% dari total pendapatan daerah, sementara kontribusi PAD hanya sebesar 12,28%. Lebih lanjut, PAD Kalimantan Tengah tercatat mengalami kontraksi sebesar 46,21% secara year-on-year akibat penurunan signifikan pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Data ini secara tegas menunjukkan bahwa kapasitas fiskal mandiri pemerintah daerah di Kalimantan Tengah masih sangat terbatas, sehingga ketergantungan struktural terhadap dana transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi dan berpotensi berdampak negatif terhadap kualitas kinerja keuangan daerah.

Ketimpangan fiskal tersebut juga tercermin secara konkret pada tingkat kabupaten/kota. Sebagai ilustrasi, data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa realisasi PAD hanya sebesar Rp 56,30 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp 617,70 miliar atau sekitar 10,97 kali lebih besar. Disparitas yang sangat mencolok ini secara eksplisit menggambarkan betapa rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Kondisi ini, apabila tidak diatasi melalui kebijakan peningkatan kapasitas fiskal yang terstruktur, berpotensi melemahkan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, dari aspek akuntabilitas pelaporan keuangan, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah menunjukkan capaian yang relatif baik. Berdasarkan data (*Data Hasil Pemeriksaan BPK RI*, 2025), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut sebanyak 11 kali, dan sejumlah kabupaten/kota juga menunjukkan tren serupa. Namun demikian, fakta ini justru memunculkan pertanyaan kritis: apakah opini WTP yang tinggi tersebut benar-benar berbanding lurus dengan kinerja keuangan daerah yang baik? Penelitian Sari dan Arza (2025) serta Fadhila et al. (2025) secara tegas menyimpulkan bahwa opini audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, karena opini audit lebih berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, bukan pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah secara substantif. Temuan ini mengindikasikan adanya gap antara kualitas pelaporan keuangan dengan kualitas kinerja keuangan yang sesungguhnya.

Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada dua landasan utama. Pertama, teori desentralisasi fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019) yang secara tegas menekankan bahwa keberhasilan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan mandirinya, bukan mengandalkan transfer pusat. Kedua, teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai agen yang berkewajiban mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat sebagai prinsipal. Kedua landasan teori ini secara bersama-sama menegaskan bahwa intergovernmental revenue, pendapatan pajak daerah, dan opini audit BPK merupakan faktor-faktor kunci yang secara teoritis berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, inkonsistensi temuan empiris dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan tersebut belum sepenuhnya terbukti secara universal, sehingga pengujian ulang pada konteks wilayah yang berbeda tetap relevan dan diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga research gap yang menjadi justifikasi utama penelitian ini. Pertama, penelitian yang secara spesifik mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat terbatas, padahal provinsi ini memiliki karakteristik fiskal yang unik dengan dominasi dana transfer yang sangat tinggi. Kedua, belum ada penelitian yang secara simultan menguji pengaruh intergovernmental revenue, pendapatan pajak daerah, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah pada konteks Kalimantan Tengah. Ketiga, inkonsistensi hasil penelitian terdahulu pada berbagai wilayah di Indonesia

menunjukkan perlunya pengujian empiris baru untuk menghasilkan bukti yang lebih kontekstual dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengisi gap tersebut dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi penguatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal tercermin melalui kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah serta pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, desentralisasi fiskal juga berperan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, meskipun dalam praktiknya masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Lebih lanjut, desentralisasi fiskal terbukti memiliki hubungan dengan tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang mencerminkan kualitas tata kelola dan transparansi keuangan. Oleh karena itu, implementasi desentralisasi fiskal yang optimal diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kemandirian fiskal (Rhamadani et al., 2019).

Teori Agency

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemberi amanah (*principal*) dan pihak penerima amanah (*agent*) dalam pengelolaan sumber daya, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Dalam konteks sektor publik, masyarakat dan pemerintah pusat bertindak sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai *agent* yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Penerapan teori ini relevan dalam penelitian mengenai kinerja keuangan daerah, karena intergovernmental revenue dan pendapatan pajak daerah merupakan sumber dana yang harus dikelola secara efektif untuk memenuhi kepentingan publik. Selain itu, opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Wijaya et al., 2018). Dengan demikian, semakin baik tata kelola dan pengawasan keuangan, maka semakin optimal pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa teori keagenan menjadi dasar penting dalam menjelaskan hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan dalam sektor public (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah juga menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi fiskalnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Daerah dengan kinerja keuangan yang baik umumnya memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mengelola pendapatan, mengalokasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Penelitian dari (Sesotyaningtyas, 2012) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain intergovernmental revenue dan pendapatan pajak daerah. Sejalan dengan itu, (Awaliyah & Efendri, 2018) menegaskan bahwa karakteristik fiskal dan kapasitas pendapatan daerah berperan dalam menjelaskan kinerja pemerintah daerah.

Pendapatan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung kinerja keuangan karena menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin optimal penerimaan pajak daerah, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Penelitian (Awaliyah & Efendri, 2018) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga penerimaan pajak daerah dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan kemampuan fiskal daerah.

Selain pendapatan pajak daerah, opini audit BPK juga dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah karena opini audit mencerminkan kualitas pelaporan dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan. (Sudarsana & Rahardjo, 2013) menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah berkaitan dengan

karakteristik pemerintah daerah serta hasil pemeriksaan BPK sebagai bentuk pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

$$\text{Kinerja Keuangan Daerah} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue didefinisikan sebagai jenis pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, Pemda membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran menurut Undang-Undang (Dasmar et al., 2020). Semakin banyaknya dana alokasi umum berarti menunjukkan semakin besar dana yang diperoleh dalam membiayai tupoksi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. meningkatnya kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kinerja yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut berhasil mengoptimalkan dana tersebut (Aminah et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, variabel intergovernmental revenue menunjukkan pengaruh yang bervariasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Iswantini et al., 2018) menunjukkan bahwa secara parsial, intergovernmental revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan; kenaikan intergovernmental revenue cenderung menurunkan kinerja keuangan daerah karena apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan, akan muncul defisit. Temuan serupa dilaporkan oleh (Azzahro, 2023) pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, di mana peningkatan intergovernmental revenue menyebabkan penurunan kinerja keuangan, sedangkan pengurangan intergovernmental revenue justru meningkatkan kinerja. (Mubarok et al., 2022) juga menegaskan adanya pengaruh negatif dan signifikan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah lokal. Namun, (Sesotyaningtyas, 2012) menemukan bahwa intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa, yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana pusat secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis:

$$\text{Intergovernmental} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

H1: Variabel intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan UU jika tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemandirian rakyat. Pendapatan pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Pajak Daerah yang digunakan untuk pembangunan wilayah dan integritas masyarakat. Pendapatan pajak daerah digunakan sebagai sumber pendapatan utama PAD untuk membiayai segala pembiayaan kegiatan (operasional) daerah (Sesotyaningtyas, 2012).

Berdasarkan tinjauan pustaka, pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian, seperti (Iswantini et al., 2018), menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten Lamongan karena kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah, kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak terbatas, serta penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar belum optimal. (Sesotyaningtyas, 2012) juga menemukan bahwa pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa berdasarkan rasio efisiensi. Selain itu, (Chilly & Tiara, 2024) menambahkan bahwa kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, rendahnya jumlah wajib pajak aktif, dan kebijakan pajak yang kurang efektif membuat pendapatan pajak daerah tidak signifikan memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Meskipun beberapa penelitian lainnya, seperti (Awaliyah & Efendri, 2018), menunjukkan adanya pengaruh positif pendapatan pajak terhadap kinerja keuangan karena peningkatan dana yang tersedia untuk belanja

daerah dan pelayanan masyarakat, secara keseluruhan terdapat ketidakpastian mengenai arah dan signifikan pengaruhnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Variabel pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan daerah

Opini Audit

Opini audit merupakan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan. Opini menjelaskan mengenai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan yang berdasar pada kriteria tertentu. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Apabila pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan (Badewin, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang berbeda. (Sirat, 2021) menemukan bahwa audit opinion secara parsial berpengaruh signifikan terhadap financial performance, sehingga opini audit dapat mencerminkan adanya kualitas pelaporan dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Sari & Arza, 2025) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena opini audit yang diberikan oleh BPK lebih menekankan pada kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan secara langsung menilai efektivitas, efisiensi, atau capaian kinerja keuangan daerah. Sejalan dengan itu, (Fadhila et al., 2025) menjelaskan bahwa keberadaan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah karena opini audit merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dengan demikian, meskipun suatu pemerintah daerah memperoleh opini audit yang baik, kondisi tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kinerja keuangannya juga meningkat. Opini audit lebih menggambarkan aspek kepatuhan dan kewajaran pelaporan, sedangkan kinerja keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, efisiensi anggaran, serta kemandirian fiskal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh intergovernmental revenue, pendapatan pajak daerah, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penggunaan pendekatan kuantitatif dan jenis asosiatif kausal relevan digunakan dalam penelitian yang menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel berdasarkan data numerik (Sugiyono, 2019)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, data APBD, serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, sampel penelitian mencakup 14 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2020–2024, sehingga diperoleh 70 observasi penelitian. Penggunaan data sekunder melalui dokumentasi juga sejalan dengan penelitian (Hapsa & Khoirudin, 2018) yang menggunakan data sekunder dari berbagai sumber resmi untuk analisis data panel daerah.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah (Y), sedangkan variabel independen terdiri atas intergovernmental revenue (X1), pendapatan pajak daerah (X2), dan opini audit BPK (X3). Intergovernmental revenue diukur berdasarkan pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah, pendapatan pajak daerah diukur berdasarkan penerimaan pajak daerah, sedangkan opini audit BPK diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 1 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai 0 untuk opini selain WTP.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Regresi data panel dipilih karena data penelitian menggabungkan data cross-section berupa 14 pemerintah daerah kabupaten/kota dan data time-series selama periode 2020–2024. Menurut Nandita et al. (2019), regresi data panel merupakan gabungan antara data cross-section dan time-series, serta dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antarvariabel. Sejalan dengan itu, Hapsa & Khoirudin (2018) menjelaskan bahwa regresi data panel dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik karena penggabungan data cross-section dan runtun waktu menghasilkan derajat kebebasan yang lebih besar.

Model regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja keuangan daerah

X1 = Intergovernmental revenue

X2 = Pendapatan pajak daerah

X3 = Opini audit BPK

Tahapan analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Uji Chow digunakan untuk memilih model common effect atau fixed effect, sedangkan uji Hausman digunakan untuk memilih model fixed effect atau random effect. Tahapan ini sejalan dengan prosedur regresi data panel yang dijelaskan oleh (Nandita et al., 2019).

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 05/21/26 Time: 14:14				
Sample: 2020 2024				
	X1	X2	X3	Y
Mean	21.03480	17.78800	0.880000	0.959200
Median	21.02000	17.52000	1.000000	0.970000
Maximum	21.82000	19.83000	1.000000	1.020000
Minimum	20.46000	16.77000	0.000000	0.760000
Std. Dev.	0.377162	0.876950	0.331662	0.059646
Skewness	0.725869	0.680207	-2.338738	-2.164571
Kurtosis	2.800208	2.388370	6.469697	7.309203
Jarque-Bera	2.236936	2.317516	35.33082	38.86532
Probability	0.326780	0.313876	0.000000	0.000000
Sum	525.8700	444.7000	22.00000	23.98000
Sum Sq.	11064.98	7928.781	22.00000	23.08700
Sum Sq. Dev.	3.414024	18.45700	2.640000	0.085384
Observations	70	70	70	70

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji statistik deskriptif dengan 70 observasi yang mencakup 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah periode 2020–2024 menunjukkan bahwa variabel Intergovernmental Revenue (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 21,0348 dengan standar deviasi 0,3772. Menurut Gujarati dan Porter (2009), statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai sebaran dan karakteristik data sebelum dilakukan

pengujian inferensial lebih lanjut. Nilai X_1 berkisar antara 20,4600 hingga 21,8200, yang menunjukkan variasi yang relatif kecil antarwilayah.

Variabel Pendapatan Pajak Daerah (X_2) memiliki nilai rata-rata 17,7880 dengan standar deviasi 0,8770, nilai maksimum 19,8300 dan minimum 16,7700. Standar deviasi yang lebih besar dibanding X_1 mencerminkan adanya disparitas kapasitas fiskal pajak yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Hal ini konsisten dengan temuan Minarsih (2015) yang menyatakan bahwa kemampuan daerah memungut pajak sangat bervariasi bergantung pada potensi ekonomi dan kapasitas aparatur daerah.

Variabel Opini Audit BPK (X_3) adalah variabel dummy dengan rata-rata 0,8800, artinya sekitar 88% observasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y) memiliki rata-rata 0,9592, maksimum 1,0200, dan minimum 0,7600 dengan standar deviasi 0,0596. Nilai rata-rata mendekati 1 mengindikasikan kinerja keuangan yang relatif baik namun masih terdapat variasi antarwilayah yang perlu diperhatikan (Masdianti & Erawati, 2016).

Pengujian Kelayakan Model Regresi Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.320698	(4,17)	0.0986
Cross-section Chi-square	10.892528	4	0.0278

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Hasil uji Chow yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas Chi-kuadrat lintas seksi sebesar 0,0278, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan intercept antar cross-section, sehingga model FEM dianggap lebih sesuai dibandingkan model efek umum.

Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.771140	3	0.1233

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil uji Hausman yang disajikan pada Tabel 3. menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,1233, lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, sehingga model efek acak (REM) dianggap lebih sesuai dibandingkan model efek tetap.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.131995 (0.7164)	0.978168 (0.3227)	1.110162 (0.2920)
Honda	0.363311 (0.3582)	0.989024 (0.1613)	0.956245 (0.1695)
King-Wu	0.363311 (0.3582)	0.989024 (0.1613)	0.956245 (0.1695)
Standardized Honda	1.222884 (0.1107)	1.440619 (0.0748)	-1.085561 (0.8612)
Standardized King-Wu	1.222884 (0.1107)	1.440619 (0.0748)	-1.085561 (0.8612)
Gourieroux, et al.	--	--	1.110162 (0.2895)

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Untuk menentukan model regresi panel yang paling tepat, dilakukan tiga pengujian: Chow test, Hausman test, dan Lagrange Multiplier (LM) test. Uji LM, dengan menggunakan Breusch-Pagan sebagai indikator signifikansi cross-sectional, digunakan untuk membandingkan Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM). Hasil uji LM menunjukkan nilai $0,7164 > 0,05$, sehingga model yang direkomendasikan berdasarkan LM adalah CEM.

Sementara itu, hasil uji Chow menunjukkan bahwa model FEM lebih tepat dibandingkan CEM, sedangkan uji Hausman mendukung penggunaan REM, karena nilai probabilitas $> \alpha = 0,05$. Berdasarkan ketiga uji tersebut, meskipun uji Chow dan Hausman memberikan indikasi berbeda, keputusan akhir model yang diterima mengikuti hasil uji LM, sehingga model CEM dipilih sebagai model regresi panel yang paling sesuai.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.039098	-0.604763
X2	-0.039098	1.000000	0.195403
X3	-0.604763	0.195403	1.000000

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Untuk memastikan tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, dilakukan pengujian koefisien korelasi antar variabel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara X1 dan X2 sebesar -0,039098, antara X1 dan X3 sebesar -0,604763, serta antara X2 dan X3 sebesar 0,195403. Semua nilai tersebut berada di bawah ambang batas 0,85, sehingga tidak terdapat indikasi

multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dianggap stabil dan bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section weights) Date: 05/21/26 Time: 10:06 Sample: 2020 2024 Periods included: 5 Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 70 Iterate weights to convergence Convergence achieved after 23 weight iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.109645	0.125514	8.840799	0.0000
X1	-0.007731	0.005561	-1.390212	0.1790
X2	0.000495	0.001870	0.264495	0.7940
X3	0.012046	0.007220	1.668343	0.1101

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Uji heteroskedastisitas menggunakan Panel EGLS (Cross-section Weights) menunjukkan probabilitas X1 sebesar 0,1790; X2 sebesar 0,7940; dan X3 sebesar 0,1101, seluruhnya > 0,05. Menurut (Gujarati & Porter, 2009), model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas variabel independen > 0,05. Selain itu, grafik residual tidak menunjukkan pola sistematis yang melampaui batas ekstrem, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Analisis Regresi Data

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh intergovernmental revenue, pendapatan pajak daerah, dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh persamaan:

$$Y = 2,825859 - 0,094442X_1 + 0,009493X_2 - 0,055613X_3$$

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa intergovernmental revenue (X1) memiliki koefisien sebesar -0,094442 dengan nilai probabilitas 0,0215 < 0,05, sehingga variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, setiap peningkatan intergovernmental revenue cenderung menurunkan kinerja keuangan daerah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Sementara itu, pendapatan pajak daerah (X2) memiliki koefisien sebesar 0,009493 dengan nilai probabilitas 0,4826 > 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pajak daerah belum mampu memberikan pengaruh yang bermakna terhadap perubahan kinerja keuangan daerah.

Variabel opini audit BPK (X3) memiliki koefisien sebesar -0,055613 dengan nilai probabilitas 0,2206 > 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, opini audit BPK tidak terbukti secara statistik mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah.

Secara simultan, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,119718 > 0,05, sehingga intergovernmental revenue, pendapatan pajak daerah, dan opini audit BPK secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,129171 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sekitar 12,92% variasi kinerja keuangan daerah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji Hipotesis
Uji T

Tabel 7. Hasil Uji T

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/13/26 Time: 22:49				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 70				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.825859	0.832230	3.395526	0.0027
X1	-0.094442	0.038021	-2.483978	0.0215
X2	0.009493	0.013279	0.714866	0.4826
X3	-0.055613	0.044053	-1.262414	0.2206

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, hasil uji menunjukkan bahwa variabel Intergovernmental Revenue (X1) memiliki koefisien sebesar -0,094442, t-statistik -2,484, dan probabilitas $0,0215 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dana dari pusat, semakin rendah kinerja keuangan yang dicapai. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui flypaper effect, di mana dana transfer yang tinggi tidak selalu digunakan secara efisien oleh pemerintah daerah, sehingga efektivitas pengelolaan keuangan cenderung menurun. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Iswantini et al., 2018) dan (Mubarak et al., 2022) yang melaporkan pengaruh negatif intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, variabel Pendapatan Pajak Daerah (X2) memiliki koefisien 0,009493 dengan probabilitas $0,4826 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Meskipun arah koefisien positif sesuai ekspektasi teoritis, pengaruhnya tidak terbukti secara statistik. Hasil ini konsisten dengan temuan (Chilly & Tiara, 2024) dan (Sesotyaningtyas, 2012), yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap kinerja keuangan di daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh basis pajak daerah yang masih terbatas, rendahnya jumlah wajib pajak aktif, serta kebijakan pajak daerah yang belum optimal, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pajak untuk mendukung belanja dan pembangunan terbatas.

Sementara itu, variabel Opini Audit BPK (X3) memiliki koefisien -0,055613 dengan probabilitas $0,2206 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Sirat, 2021) dan (Sari & Arza, 2025) yang menyatakan bahwa opini audit WTP lebih mencerminkan kewajaran penyajian laporan keuangan daripada efisiensi atau efektivitas pengelolaan keuangan. Artinya, daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK belum tentu memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, karena opini audit berfokus pada kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan kewajaran laporan, bukan pada output fiskal atau efektivitas penggunaan dana.

Dengan demikian, hipotesis H1 diterima karena intergovernmental revenue terbukti berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan hipotesis H2 dan H3 juga diterima karena pendapatan pajak daerah dan opini audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil ini memberikan pemahaman bahwa kinerja keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh ketergantungan pada transfer pusat daripada PAD atau opini audit, sekaligus menekankan pentingnya efektivitas pengelolaan dana dan kapasitas fiskal daerah.

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

R-squared	0.238025	Mean dependent var	0.959200
Adjusted R-squared	0.129171	S.D. dependent var	0.059646
S.E. of regression	0.055661	Akaike info criterion	-2.793436
Sum squared resid	0.065061	Schwarz criterion	-2.598416
Log likelihood	38.91796	Hannan-Quinn criter.	-2.739346
F-statistic	2.186649	Durbin-Watson stat	1.397813
Prob(F-statistic)	0.119718		

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Hasil uji F-statistik menunjukkan nilai sebesar 2,186649 dengan probabilitas $0,119718 > 0,05$, sehingga secara simultan variabel X1 (Intergovernmental Revenue), X2 (Pendapatan Pajak Daerah), dan X3 (Opini Audit BPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan kriteria Gujarati dan Porter (2009), hipotesis nol (H_0) ditolak jika $\text{Prob}(F) < 0,05$; karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan variabel penting lain yang belum dimasukkan ke dalam model, seperti belanja modal, kemandirian fiskal, atau ukuran pemerintah daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Masdiantini & Erawati (2016). Nilai R-squared sebesar 0,238025 dan Adjusted R-squared 0,129171 juga menunjukkan bahwa variasi kinerja keuangan yang dijelaskan oleh ketiga variabel independen masih relatif rendah, sehingga model masih bisa ditingkatkan dengan memasukkan variabel tambahan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.238025	Mean dependent var	0.959200
Adjusted R-squared	0.129171	S.D. dependent var	0.059646
S.E. of regression	0.055661	Akaike info criterion	-2.793436
Sum squared resid	0.065061	Schwarz criterion	-2.598416
Log likelihood	38.91796	Hannan-Quinn criter.	-2.739346
F-statistic	2.186649	Durbin-Watson stat	1.397813
Prob(F-statistic)	0.119718		

Sumber: Data diolah menggunakan EViews (2026)

Hasil analisis menunjukkan bahwa R-squared sebesar 0,238025, yang mengindikasikan bahwa sekitar 23,80% variasi kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel Intergovernmental Revenue (X1), Pendapatan Pajak Daerah (X2), dan Opini Audit BPK (X3). Sementara itu, Adjusted R-squared sebesar 0,129171 memperhitungkan jumlah variabel independen dan sampel, sehingga menunjukkan bahwa sekitar 12,92% variasi kinerja keuangan daerah dijelaskan oleh model setelah dikoreksi untuk faktor kompleksitas model.

Nilai R-squared yang relatif rendah menunjukkan bahwa model ini masih memiliki variabel penting lain yang belum dimasukkan, seperti belanja modal, kemandirian fiskal, atau ukuran pemerintah daerah, yang mungkin juga mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Meskipun demikian, nilai R-squared dan Adjusted R-squared tetap memberikan gambaran bahwa model mampu menjelaskan sebagian variasi kinerja keuangan dengan data yang tersedia.

Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kalimantan Tengah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa intergovernmental revenue (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, dengan koefisien sebesar $-0,094442$ dan probabilitas $0,0215 < 0,05$. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis H1 yang menyatakan bahwa

semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, semakin rendah kinerja keuangan yang dicapai. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui mekanisme flypaper effect, di mana besarnya dana transfer yang diterima tidak mendorong efisiensi pengelolaan anggaran, melainkan justru melemahkan insentif daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri (Mubarak et al., 2022).

Kondisi ini sangat relevan dengan karakteristik fiskal Kalimantan Tengah, di mana struktur pendapatan daerah masih sangat didominasi oleh dana transfer yang mencapai 87,72% dari total pendapatan. Tingginya proporsi intergovernmental revenue tersebut menyebabkan pemerintah daerah cenderung bergantung pada alokasi pusat sehingga kapasitas pengelolaan keuangan secara mandiri menjadi terbatas. Ketika realisasi belanja daerah melampaui pendapatan yang dihasilkan secara mandiri, efisiensi fiskal menurun dan berdampak langsung pada melemahnya kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Iswantini et al., 2018) pada Kabupaten Lamongan dan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang keduanya menemukan pengaruh negatif dan signifikan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan daerah (Azzahro, 2023).

Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kalimantan Tengah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, dengan koefisien sebesar 0,009493 dan probabilitas $0,4826 > 0,05$, sehingga hipotesis H_2 diterima. Meskipun arah koefisien positif sesuai dengan ekspektasi teoritis, pengaruhnya tidak terbukti secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pembentukan kinerja keuangan di Kalimantan Tengah masih sangat terbatas akibat basis pajak yang sempit, rendahnya jumlah wajib pajak aktif, serta kapasitas aparatur pemungut pajak yang belum optimal (Chilly & Tiara, 2024).

Dalam konteks Kalimantan Tengah, PAD tercatat mengalami kontraksi sebesar 46,21% secara year-on-year akibat penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah, yang mencerminkan lemahnya potensi fiskal mandiri daerah. Ketika kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan sangat kecil dibandingkan dengan dana transfer, variasi dalam penerimaan pajak tidak cukup kuat untuk menggerakkan perubahan signifikan pada kinerja keuangan secara keseluruhan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Sesotyaningtyas (2012) yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa, serta Iswantini et al. (2018) yang menyimpulkan hal serupa pada Kabupaten Lamongan dengan alasan rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kalimantan Tengah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit BPK (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, dengan koefisien sebesar $-0,055613$ dan probabilitas $0,2206 > 0,05$, sehingga hipotesis H_3 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak serta-merta memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan daerah dengan opini di bawah WTP. Hal ini disebabkan karena opini audit BPK pada dasarnya merupakan penilaian profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP), bukan penilaian atas efektivitas, efisiensi, atau capaian output fiskal pengelolaan keuangan daerah (Fadhila et al., 2025).

Dalam konteks Kalimantan Tengah, meskipun Pemerintah Provinsi telah meraih opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut dan sejumlah kabupaten/kota juga menunjukkan tren serupa, capaian tersebut tidak secara otomatis mencerminkan optimalnya pengelolaan pendapatan, efisiensi belanja, maupun tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, terdapat gap yang nyata antara kualitas pelaporan keuangan yang diukur melalui opini audit dengan kualitas kinerja keuangan yang sesungguhnya. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sari dan Arza (2025) serta Sirat (2021), yang menegaskan bahwa opini audit lebih mencerminkan aspek kepatuhan dan kewajaran pelaporan daripada kinerja pengelolaan keuangan daerah secara substantif.

Pengaruh Intergovernmental Revenue, Pendapatan Pajak Daerah, dan Opini Audit Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kalimantan Tengah

Hasil uji F menunjukkan nilai F-statistik sebesar 2,186649 dengan probabilitas $0,119718 > 0,05$, yang berarti secara simultan variabel intergovernmental revenue (X1), pendapatan pajak daerah (X2), dan opini audit BPK (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Hasil ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah secara komprehensif. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,129171 memperkuat kesimpulan tersebut, bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan sekitar 12,92% variasi kinerja keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 87,08% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.

Kondisi ini sejalan dengan karakteristik fiskal Kalimantan Tengah yang kompleks, di mana kinerja keuangan daerah kemungkinan besar turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti belanja modal, ukuran pemerintah daerah (government size), tingkat kemandirian fiskal, serta kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan. Meskipun secara simultan ketiga variabel tidak signifikan, secara parsial intergovernmental revenue terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, yang menegaskan bahwa dominasi dana transfer merupakan faktor utama yang menekan kinerja keuangan daerah di Kalimantan Tengah. Temuan ini konsisten dengan pandangan (Jannah, 2021) bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya oleh satu atau dua variabel saja, melainkan memerlukan model yang lebih komprehensif dengan cakupan variabel yang lebih luas.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat melemahkan kemandirian fiskal daerah dan belum sepenuhnya mendorong pengelolaan keuangan yang efektif. Sementara itu, pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa kontribusi pajak daerah masih belum cukup kuat dalam menopang peningkatan kinerja keuangan. Selain itu, opini audit BPK juga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, karena opini audit lebih mencerminkan kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara substantif. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah di Kalimantan Tengah lebih dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan fiskal dibandingkan oleh pajak daerah maupun opini audit. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal, mengoptimalkan PAD, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran agar kinerja keuangan dapat lebih berkelanjutan.

Referensi

1. Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan. *Jurnal SIKAP*, 3(2), 147–165.
2. Awaliyah, S. R., & Efendri. (2018). *Pengaruh Belanja Daerah , Pajak Daerah , Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 1, 1–12.
3. Azzahro, N. A. (2023). *INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2021*. 2(4), 577–591.
4. Badewin. (2016). PENGARUH OPINI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2012), 1–11.
5. Chilly, S., & Tiara, B. (2024). *Pengaruh Leverage , Tingkat Kekayaan Daerah , Tingkat Ketergantungan pada Pusat , Temuan Audit BPK , Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 4, 9081–9100.
6. Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
7. Dasmawati, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, BELANJA DAERAH, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Al Iqtishad*, 2, 39–57.
8. *Data APBD Indonesia dari DJPK*. (2025). <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
9. *Data Hasil Pemeriksaan BPK RI*. (2025). https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaanhttps://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan
10. Fadhillah, L., Utaminingsih, T. H., Handarini, D., Akuntansi, P. S., Jakarta, U. N., Perimbangan, D., Audit, O., & Daerah, K. K. (2025). *EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH : PERAN BELANJA DAERAH DAN*. 5, 1376–1388.
11. Gujarati, & Porter. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
12. Hanum, E. L. (2022). E-JRA Vol. 11 No. 09 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
13. Hapsa, S., & Khoirudin, R. (2018). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2008-2016. *JEL Classification*, 18(2).

14. Iswantini, D. A., Hirmantono, A., & Natalia, R. (2018). *Pajak daerah, intergovernmental revenue dan kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*. 32–45.
15. Jannah, M. (2021). *The effect of BPK audit result on financial performance*. 6(2020), 1253–1258. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.9.001>
16. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Agency Theory*.
17. Mubarak, M. H., Nasution, A. A., & Kesuma, S. A. (2022). *Local government financial performance : the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case of South Sumatra Province , Indonesia)*. 9(6), 503–512. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364>
18. Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). *Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015*. 2(1), 42–52.
19. Nathasya, H. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2021*, 5(1), 70–80.
20. Rhamadani, S., Khulaidah, L., & Sakti, F. T. (2019). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PERIODE 2020–2024 BERDASARKAN RASIO KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI FISKAL*. 16(2), 488–498.
21. Sari, B. P., & Arza, F. I. (2025). *Pengaruh Opini Audit, Intergovernmental Revenue , dan Tax Effort terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022*. 3(2), 250–266.
22. Sesotyaningtyas, M. (2012). Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
23. Sirat, A. H. (2021). *The Effect of Audit Results and Local Characteristics on Financial Performance of Province Governments in Indonesia*. 12(14), 57–65. <https://doi.org/10.7176/RJFA/12-14-06>
24. Siswanto, D., Sam, I., & Silvera, D. L. (2023). *Jurnal Cakrawala Akuntansi FINANCIAL PERFORMANCE OF REGENCY / CITY IN*. (23), 1–22.
25. Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH*. 2(6), 1–13.
26. Sugi, L. P. M. W., & Mertha, M. (2024). *PAD , Dana Transfer Ke Daerah , Belanja Modal Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Wilayah Flores Provinsi NTT Universitas Udayana PENDAHULUAN Berlakunya otonomi daerah daerah secara resmi pada tahun 1999 menyebabkan pemerintah pusat dan p*. 10(6), 122–133.
27. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ed. 2, Cet). Alfabeta.
28. Wijaya, A. H. C., Rante, A., & Ramandey, P. I. (2018). *PENGARUH OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*. *Akuntansi, Jurnal*, 13(November), 123–134.